

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PEMAGANGAN
LULUSAN PERGURUAN TINGGI

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti arahan Presiden mengenai paket kebijakan ekonomi tahun 2025 yang salah satunya adalah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi, perlu segera dilakukan langkah percepatan yang diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan guna mengimplementasikan kebijakan dimaksud. Adapun tujuan dari Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu meningkatkan kompetensi, pengalaman kerja, dan membuka peluang kontrak permanen bagi lulusan pemagangan yang merupakan lulusan baru program diploma dan sarjana.

Pengaturan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi merupakan *lex specialis* dari penyelenggaraan program pemagangan pada umumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Pengaturan program tersebut mengadopsi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, Kementerian Ketenagakerjaan perlu menyusun pedoman umum (RPermenaker) dan pedoman teknis (Petunjuk Teknis). RPermenaker disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi melalui mekanisme bantuan pemerintah dalam bentuk uang saku agar dapat diimplementasikan secara efektif serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Urgensi

1. Memberikan payung hukum dalam pemberian bantuan pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi berupa uang saku yang menjadi salah satu agenda dalam paket kebijakan ekonomi tahun 2025.
2. Memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemberian bantuan pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi berupa uang saku bagi Kementerian Ketenagakerjaan, penyelenggara pemagangan, peserta pemagangan, dan pemangku kepentingan terkait.

Tujuan

1. Mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia, menyiapkan lulusan perguruan tinggi memasuki dunia kerja, dan memberikan peluang kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi.
2. Meningkatkan peran serta industri dalam penyelenggaraan pemagangan.

Materi Pengaturan

1. Peserta pemagangan sebagai penerima bantuan pemerintah.
2. Penyelenggara pemagangan.
3. Tata cara penyelenggaraan program pemagangan.
4. Besaran dan tata cara pemberian bantuan pemerintah program pemagangan.
5. Pelaporan.
6. Monitoring dan evaluasi.

Jangkauan Arah Pengaturan

Rancangan Permenaker ini mengatur:

1. persyaratan peserta pemagangan sebagai penerima bantuan pemerintah;
2. persyaratan penyelenggara pemagangan;
3. besaran uang saku peserta pemagangan;
4. tata cara pemberian bantuan pemerintah;
5. pelaporan peserta pemagangan sebagai dasar penyaluran bantuan pemerintah;
6. pelaporan bank penyalur atas pelaksanaan penyaluran uang saku peserta pemagangan; dan
7. monitoring dan evaluasi oleh Direktur Jenderal melibatkan unit teknis terkait di Kementerian Ketenagakerjaan.